

Rencana Freeport Tingkatkan TKDN Diapresiasi

Written by David Dwiarto

Thursday, 01 October 2015 07:23 - Last Updated Thursday, 01 October 2015 07:25

JAKARTA. Pemerintah serius menindaklanjuti rencana PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada wilayah operasinya di Papua.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya mineral, mengatakan dirinya akan mengunjungi Papua bersama Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menindaklanjuti rencana Freeport menggandeng perusahaan nasional dalam operasinya.

"Freeport kan bermaksud memberikan kontrak kepada BUMN unyuk membeli barang dan jasa. Misalnya butuh batu bara, apa bisa dihubungkan kepada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan peledak ke Pindad atau Dahana," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/9).

Sudirman menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang fokus pada peningkatan TKDN pada industri di dalam negeri. Bahkan, Presiden meminta agar pertumbuhan ekonomi saat ini dilakukan dengan basis peningkatan nilai tambah dan pengembangan industri lokal.

Sudirman, sebelumnya juga mengatakan Chairman of Board Freeport McMoran Jim Bob Moffett secara spesifik mengatakan akan membeli alat-alat berat yang diproduksi PT Pindad (Persero). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan TKDN dari operasionalnya di Papua.

"Mereka juga akan membeli sebagian bahan peledak yang dibutuhkan dari Pindad dan PT Dahana (Persero)," ujarnya.

Sudirman menuturkan komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang meminta perusahaan meningkatkan TKDN. Bahkan, komitmen tersebut lebih menguntungkan pemerintah, karena Freeport mengalokasikan sebagian belanja modalnya untuk membeli produk BUMN.

Rencana Freeport Tingkatkan TKDN Diapresiasi

Written by David Dwiarto

Thursday, 01 October 2015 07:23 - Last Updated Thursday, 01 October 2015 07:25

Menurutnya, Presiden Jokowi juga meminta keberadaan Freeport harus mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi Papua dan Indonesia. Keberadaan perusahaan di daerah, harus mampu menjadi penggerak perekonomian, sehingga ikut membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. (Lili Sunardi)

Sumber : **Bisnis Indonesia**, 19 September 2015